

## “BACK TO NATURE” J.J. ROUSSEAU DALAM KONTEKS DEMOKRASI DI INDONESIA

Oktavianus Edward Metta<sup>1</sup>, Perseverando Giano Happy Putra<sup>2</sup>, Stefanus Suriadi  
Jadur<sup>3</sup>, Ewaldus Nuka<sup>4</sup>, Reginaldus Banis<sup>5</sup>, Gregorius Sila<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

[vianmetta@gmail.com](mailto:vianmetta@gmail.com)<sup>1</sup>, [gianohappyputra25@gmail.com](mailto:gianohappyputra25@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[stefanussuriadi2001@gmail.com](mailto:stefanussuriadi2001@gmail.com)<sup>3</sup>, [nukaewaldus@gmail.com](mailto:nukaewaldus@gmail.com)<sup>4</sup>, [egybanis@gmail.com](mailto:egybanis@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[gregoriussila02@gmail.com](mailto:gregoriussila02@gmail.com)<sup>6</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji relevansi gagasan “Back to Nature” J.J. Rousseau dalam konteks demokrasi di Indonesia. Indeks demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kini bangsa Indonesia sedang berada dalam periode autokratisasi/kemunduran demokrasi. Berdasarkan laporan Freedom House, indeks demokrasi di Indonesia turun 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada tahun 2023. EIU juga mencatat skor indeks demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang saat itu sebesar 6,71. Penurunan skor tersebut berdampak pada peringkat demokrasi Indonesia dalam dunia global, menurun dari 52 menjadi 24. Kondisi tersebut pun menjebak Indonesia dalam status sebagai negara flawed democracy/demokrasi cacat. Kemunduran demokrasi ini pun dapat ditinjau dari realita yang terjadi, seperti: pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme; fungsi pemerintahan; politik dinasti; politik identitas; politik uang; praktik KKN dan lainnya. Kemelut semacam ini tentu menjadi momok yang menakutkan bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu gerakan resistansi dan resiliensi terhadap demokrasi Indonesia. Penulis menawarkan gagasan “Back to Nature” J.J. Rousseau sebagai bentuk resistansi untuk meminimalisir kemunduran demokrasi dewasa ini. Rousseau mengatakan bahwa jika manusia ingin selamat, maka hanya ada satu jalan: “Back to Nature”. Demokrasi Indonesia perlu “Back to Nature”. Gagasan ini bukan bermaksud untuk Kembali pada zaman primitif, melainkan sebagai upaya untuk mengembalikan demokrasi yang autentik. Koalisi pro-demokrasi yang terdiri atas kerjasama antara aktor politik, institusional dan sosial, dapat membawa Indonesia pada demokrasi yang autentik/asali, dengan membendung rezim otoriter agar tidak mengkonsolidasi kekuatannya lebih lanjut.

**Kata Kunci:** *Back to Nature J.J Rousseau*, Demokrasi di Indonesia.

## ABSTRACT

*This research is a literature study with a qualitative descriptive research approach that aims to examine the relevance of J.J. Rousseau's "Back to Nature" idea in the context of democracy in Indonesia. The democracy index in Indonesia continues to decline from year to year. Currently, Indonesia is in a period of autocratization/democratic decline. Based on the Freedom House report, the democracy index in Indonesia fell from 62 points in 2019 to 53 points in 2023. The EIU also recorded Indonesia's 2023 democracy index score at 6.53. This figure decreased from 6.71 in 2022. This decline in the score has an impact on Indonesia's democracy ranking in the global world, dropping from 52 to 24. This condition also traps Indonesia in the status of a flawed democracy/democracy. This democratic decline can also be seen from the reality that occurs, such as: a significant reduction in civil liberties, pluralism; government functions; dynastic politics; identity politics; money politics; corruption practices and others. This kind of turmoil is certainly a frightening specter for the future of the Indonesian nation. Therefore, a resistance and resilience movement is needed for Indonesian democracy. The author offers J.J. Rousseau's "Back to Nature" idea as a form of resistance to minimize the current decline of democracy. Rousseau said that if humanity wants to survive, there is only one way: "Back to Nature." Indonesian democracy needs a "Back to Nature." This idea is not intended to return to primitive times, but rather an effort to restore authentic democracy. A pro-democracy coalition consisting of cooperation between political, institutional, and social actors can lead Indonesia to authentic/original democracy, by preventing the authoritarian regime from further consolidating its power.*

**Keywords:** *Back To Nature J.J Rousseau, Democracy In Indonesia.*

## A. PENDAHULUAN

Setelah lebih dari 25 tahun berlalu sejak dimulainya era reformasi, demokrasi di Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal dan stabil yang diharapkan. Bahkan, negara ini tengah menghadapi tantangan autokratisasi atau penurunan dalam praktik demokrasi<sup>1</sup>. Belakangan ini, indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Situasi semacam ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia. Berbagai skandal, ketidaksetaraan, dan penyimpangan etika terjadi di mana-mana. Prinsip-prinsip Pancasila, yang seharusnya dijunjung tinggi, sering kali diabaikan, konstitusi negara dimanipulasi, moralitas mengalami penurunan yang signifikan, dan norma-norma etika seringkali diabaikan begitu saja. Singkatnya,

---

<sup>1</sup>Risky Alif Alvian, "Demokrasi yang Bertahan" dalam tempo.co 12 Februari 2024, <https://koran.tempo.co/read/opini/487202/upaya-mencegah-kemunduran-demokrasi>, diakses pada 20 Maret 2024.

demokrasi Indonesia saat ini dapat diklasifikasi sebagai negara dengan demokrasi cacat atau flawed demokrasi<sup>2</sup>.

Menurut data yang disajikan oleh Freedom House, sebelum tahun 2014, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara dengan demokrasi yang bebas dengan skor 2,5. Namun, sejak tahun 2014, Indonesia hanya dianggap sebagai negara yang demokrasinya sebagian bebas. Trend penurunan yang serupa juga terlihat dalam pengukuran indeks demokrasi versi Democracy Index yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), di mana Indonesia telah dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat selama 13 tahun terakhir. Data dari Varieties of Democracy (V-Dem) juga menunjukkan bahwa indeks demokrasi liberal Indonesia telah mengalami penurunan dari 0,52 pada tahun 2014 menjadi 0,42 pada tahun 2022<sup>3</sup>. Perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus dalam perjalanan reformasi negara. Meskipun menurut beberapa lembaga seperti BPS dan Bappenas, secara keseluruhan demokrasi Indonesia masih dapat ditempatkan dalam kategori yang cukup baik, namun kenyataannya demokrasi di Indonesia belum mencapai tingkat stabilitas dan konsolidasi yang diinginkan<sup>4</sup>. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai kesalahan dalam praktik demokrasi dan manipulasi hukum masih menjadi hambatan serius bagi proses demokrasi di negara ini.

Pemilu yang diadakan oleh bangsa Indonesia dapat menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat demokrasi di negara ini. Pemilu tahun 2024, yang baru saja berlangsung, seharusnya menjadi peluang yang solid untuk menguatkan kembali demokrasi yang telah melemah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, harapan tersebut segera pupus karena adanya permainan politik yang justru merusak cita-cita demokrasi yang sejati. Hal ini tercermin dalam dua isu yang menjadi pusat perhatian publik, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, serta penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin

---

<sup>2</sup>Wasisto Raharjo Jati, "Fenomena Kemunduran Demokrasi" dalam THC INSIGHTS No.27/09 juni 2021 [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id), <https://scholar.google.com/sholar/fenomena-kemunduran-demokrasi-indonesia-2021>, diakses pada 19 Maret 2024.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup>Yohan Wahyu, "Pemilu 2024 dan Pertaruhan Demokrasi di Indonesia" dalam Kompas.id, 17 Januari 2024 <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasi-indonesia?> diakses pada 20 Maret 2024.

memburuk karena kasus hukum yang menimpa pimpinannya. Bahkan, pemilu tahun 2024 dianggap sebagai salah satu pemilu terburuk sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Memperhatikan perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi sangat penting dan perlu dievaluasi secara terus-menerus dalam perjalanan reformasi negara. Bangsa Indonesia harus membangun resistansi untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang autentik. Sebagai bagian dari gerakan resistansi tersebut, penulis mengusulkan konsep pemikiran J.J. Rousseau tentang "Back to Nature" sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemunduran demokrasi saat ini. Rousseau percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai keselamatan adalah dengan "Back to Nature" atau mengembalikan diri pada keadaan awal<sup>5</sup>. Baginya, kondisi alamiah itu baik dan membahagiakan. Awalnya, manusia hidup dalam keadaan baik. Namun, dengan berjalannya waktu dan munculnya lingkungan serta masyarakat, manusia mulai terjerumus dalam berbagai bentuk kejahatan.

Di tengah kekacauan dan kemunduran demokrasi, Rousseau menawarkan gagasan "Back to Nature" sebagai salah satu jalan keluar agar manusia bisa hidup aman lagi. Dalam gagasannya itu, ia sangat menjunjung tinggi kebebasan, kedaulatan rakyat dan kehendak umum. Keadaan asali bisa saja mengalami kemerosotan. Manusia pun membutuhkan persektuan (dalam hal ini negara) untuk melestarikan keadaan asali itu. Dan cara terbaik menurut Rousseau adalah persektuan/negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Sebab dalam kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya, sebab dia adalah sumber kedaulatan dan dengan beradaptasi dengan kehendak umum, kepentingan realnya dipenuhi<sup>6</sup>.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menghubungkan gagasan Rousseau dengan konteks demokrasi di Indonesia. Meskipun gagasan Rousseau cenderung pada totaliterisme, namun gagasannya partikularnya sangat cocok untuk diaplikasikan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia perlu "Back to Nature". Dalam konteks ini, gagasan ini bertujuan untuk membawa bangsa Indonesia menuju demokrasi yang autentik atau sesuai dengan esensinya. Untuk mendalami tema sederhana ini,

---

<sup>5</sup> K Bertens, *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 83.

<sup>6</sup> F. Budi Hardiman, *Pemikiran Modrn dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 117.

penulis akan membaginya dalam beberapa sub topik, yakni: Apa inti dari “Back to Nature J.J Rousseau”? Bagaimana demokrasi Indonesia dalam gagasan “back to nature”? Apa langkah konkret dari gagasan “Back to Nature”?.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian sederhana ini ialah penelitian kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan<sup>7</sup>. Melalui metode ini, penulis berusaha mendalami masalah kemunduran demokrasi dari sudut pandang Jean-Jacques Rousseau. Data-data diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, dengan menggunakan berbagai rujukan buku, artikel ilmiah, jurnal, ataupun berita-berita aktual. Setelah mengumpulkan berbagai data, Penulis pun meninjau dan menganalisisnya dari sudut pandang “back to nature” J.J Rousseau.

Metode ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data atau informasi yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan secara sistematis gagasan Rousseau tentang konsep “back to nature”, kemudian menghubungkan dan menginterpretasikannya dengan persoalan demokrasi masa kini. Melalui proses analisis tersebut, penulis berupaya menemukan relevansi pemikiran Rousseau sebagai alternatif konseptual dan refleksi-kritis dalam memaknai kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pokok Pikian Rousseau***

Jean Jacques Rousseau lahir di Jenewa pada tanggal 28 Juni 1712 dan meninggal 2 Juli 1778. Ia adalah seorang filsuf, penulis, dan komposer besar Pencerahan. Pemikiran filosofisnya mempengaruhi Revolusi Perancis, perkembangan politik modern dan landasan pemikiran pendidikan. Rousseau dikenal sebagai filsuf pemberontak intelektual karena keluasan pemikirannya. Selain itu Rousseau juga merupakan salah satu pionir

---

<sup>7</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, Oktober 2018), hlm.9.

gerakan revolusioner Perancis pada akhir abad ke-18, karena ia menciptakan gerakan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu monarki absolut.

Rousseau menggunakan konsep keadaan alamiah untuk menjelaskan keadaan asli umat manusia, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar sifat manusia dan menjelaskan kehidupan dalam masyarakat modern<sup>8</sup>. Keadaan asli manusia pada dasarnya adalah baik. Kebaikan itu sudah menjadi kodrat atau bagian yang tertanam dalam diri manusia. Keadaan alamiah menggambarkan suatu situasi atau kondisi di mana manusia hidup dalam kebahagiaan dan kebebasan mutlak, sehingga tidak ada kebencian yang tertanam dalam diri manusia sejak awal. Tetapi kemudian, keadaan asli itu pun cenderung merosot juga karena kendala yang dihadapi manusia lebih banyak daripada jumlah sumber untuk mempertahankan diri<sup>9</sup>.

Kemerosotan keadaan asli itu muncul dari peradaban modern, lingkungan dan masyarakat sekitar itu sendiri yang telah memengaruhi manusia.<sup>10</sup> Menurutnya, peradaban modern yang dialami manusia hanya membawa kemunafikan, kecongkakan, dan ketidaksungguhan bagi manusia. Segala bentuk penderitaan dan kejahatan dunia sebetulnya berasal dari kehidupan bersama dalam masyarakat, dari ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sejumlah peradaban itu memburukkan kodrat manusia yang awalnya baik menuju pada suatu kekacauan dan ketidakteraturan.

“Discourse On the Arts and Sciences”, sebuah artikel menarik yang ditulis Rousseau, menggambarkan tubuh manusia sebagai basis dari masyarakat, sedangkan pikiran hanyalah perhiasan belaka<sup>11</sup>. Melalui esai ini, ia hendak mendeskripsikan sifat artifisial kebudayaan yang meruntuhkan kodrat asli manusia. Pikiran manusia terejawantah dalam entitas kebudayaan, seperti: ilmu, seni dan sastra. Segala entitas ini lahir dari kejahatan sehingga berdampak pada tingkah laku manusia yang bertendensi pada tingkah laku yang jahat pula. Kritiknya sungguh bertolak belakang dengan gagasan pada abad pertengahan, di mana kemajuan teknis dipandang sebagai bagian dari

---

<sup>8</sup> Alvira Agatha Putri Ryansyah, "Demokrasi Kita dalam Sudut Pandangan Rousseau", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, 2:2 (Bandung, 2020), hlm. 3.

<sup>9</sup> F. budi Hardiman, *op.cit.*, hlm. 116.

<sup>10</sup> Alvira Agatha Putri Ryansyah., *loc.cit.*

<sup>11</sup> F. budi Hardiman, *op.cit.* hlm. 113.

kemajuan moral. Tetapi Rousseau justru memandang kemajuan teknis sebagai bagian dari kemerosotan moral karena lahir dari kejahatan.

Rousseau kemudian menerbitkan sebuah buku berjudul “Emile Ou De L’education”. Buku ini merupakan sebuah tilikan romantis dalam dunia pendidikan, meskipun mengundang begitu banyak polemik alot pada zamannya. “Berbuatlah sebaliknya dari yang menjadi kebiasaan sekarang ini dan hampir selalu anda bertindak dengan tepat”<sup>12</sup>. Gagasan Rousseau tentang pendidikan mengindikasikan aksi mainstream terhadap praksis pendidikan yang pada saat itu begitu ketat, otoriter dan dengan disiplin yang tinggi. Sebagaimana yang selalu ditegaskannya bahwa manusia menurut kodratnya baik, tetapi kemudian dinodai oleh kebudayaan. Dan salah satu unsur kebudayaan yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan moral adalah Pendidikan. Menurutny, Pendidikan perlu bertolak dari kodrat anak dan bukan dari diri si pendidik<sup>13</sup>. Seorang pendidik tidak perlu membuang banyak tenaga untuk mengajar dan membimbing anak, biarkan anak berkembang sendiri dengan mengikuti naluri-naluri alamiah dan rasa cinta dalam diri anak. Para pendidik cukup memberikan koreksian seperlunya. Segala bentuk kotbah dan disiplin mesti disingkirkan karena dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Rousseau juga menulis buku tentang *Du Contrat Social*. Dalam buku itu, ia mengusulkan sebuah susunan masyarakat yang bebas, bahagia dan manusiawi menurut asas-asas kodrati manusia. Manusia mesti hidup bebas sesuai kodratnya dan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Rousseau menggambarkan bahwa keadaan asali juga memiliki tendensi untuk mengalami kemerosotan. Kemerosotan ini lahir kepemilikan pribadi yang kemudian menimbulkan ketidaksamaan sosial dan lenyapnya keadaan asali manusia. Maka, persekutuan, dalam hal ini negara, menjadi salah satu alternatif urgen untuk melestarikan keadaan asali itu. Persekutuan inilah yang dibahasakan Rousseau sebagai kontrak sosial, di mana tatanan sosial dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan atau konvensi sosial<sup>14</sup>. Persekutuan ini pun melahirkan sebuah lembaga moral kolektif, yakni

---

<sup>12</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke 3* (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm. 5.

<sup>13</sup> Rahmad dan Rusma Yulidawati, “Serpah Pemikiran Jean Jacques Rousseau Terhadap Pendidikan” dalam *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 2:2 (Desember 2021), hlm. 20.

<sup>14</sup> K Bertens, *op.cit*, hlm. 87.

negara dalam artian pasif dan kedaulatan dalam artian aktif. Motif utama dari kontrak sosial ini ialah mempertahankan kebebasan asali manusia. Dalam lembaga ini, kehendak individu tunduk pada kehendak umum yang dianggap lebih mencerminkan kepentingan real daripada kehendak individu. Dan Rousseau sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan adalah bentuk pelaksanaan kehendak umum. Artinya bahwa melalui kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya dan dengan beradaptasi dengan kehendak umum, kebutuhan realnya dapat terpenuhi secara maksimal. Dengan konsep ini, Rousseau dianggap sebagai pendukung demokrasi yang paling penting, meskipun bertendensi mengarah pada totalitarianisme.

## Perjalanan demokrasi di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bangsa Indonesia telah melalui beberapa periode penting dalam perjalanan berdemokrasi, dan hingga saat ini sedang menjalani periode reformasi. Perkembangan demokrasi Indonesia pun dapat dibagi dalam dua tahap penting, yakni pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Hingga saat ini, perkembangan demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang-surut, bahkan kemunduran yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam data yang disajikan oleh lembaga the Economist Intelligence Unit (EIU), indeks Demokrasi Indonesia dan Democracy Report, di mana demokrasi Indonesia mengalami pengurangan yang signifikan, yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, tetapi juga fungsi pemerintahan<sup>15</sup>. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana demokrasi mewujudkan diri dalam berbagai aspek kehidupan dan menata relasi antara negara atau pemerintah dengan rakyat, ataupun sebaliknya. Posisi keseimbangan (equilibrium position) dan saling melakukan pengawasan (check and balance) menjadi dua hal penting yang mesti selalu hidup dalam berdemokrasi<sup>16</sup>.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat diklasifikasi dalam empat periode penting, yakni: *Pertama*, Demokrasi Parlementer periode 1945-1959<sup>17</sup>. Periode ini

---

<sup>15</sup> Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi di Indonesia" 18:2, Mei 2020, <https://www.googleilm.254>.

<sup>16</sup> Puslit IAIN SYARIF Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 216.

<sup>17</sup> Seri Tempo, *Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 3.

dikenal dengan sistem Demokrasi Parlementer dan mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan, yang kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. UUDS 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen, di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya. Parlemen memiliki kedudukan yang penting sehingga berdampak pula pada kedudukan partai politik yang semakin kuat. Namun, demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena sistem koalisi dan fragmentasi partai politik yang kerap kali membuat kabinet jatuh-bangun. Kuatnya pengaruh parlemen dan kabinet yang silih berganti dapat menghambat perkembangan ekonomi dan politik. Lepas dari berbagai kemelut, sistem demokrasi parlementer menyisakan salah satu peristiwa penting pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap, yaitu diselenggarakannya pemilihan umum pertama yang berjalan dengan tingkat partisipasi tinggi (lebih dari 39 juta orang).

*Ke dua*, Demokrasi Terpimpin periode 1959-1965. Demokrasi terpimpin adalah buah dari konsepsi Soekarno yang digulirkan 21 Februari 1957, terutama setelah bersitegang dengan Bung Hatta. Ciri utama dari periode ini ialah dominasi peran presiden, terbatasnya partai politik dan berkembangnya pengaruh PKI dan ABRI dalam ranah politik<sup>18</sup>. Masa ini dimulai ketika Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, yang dianggap akan mampu mengatasi kemacetan politik. Namun, terjadi begitu banyak penyimpangan pada masa itu, seperti: penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun (MPRS No. III/1963), intervensi presiden dalam ranah yudikatif (Undang-Undang No. 19/1964), dan lainnya. Masa ini tidak menunjukkan demokrasi yang autentik, karena banyak terjadi kesalahan kaprah yang menjurus pada pemerintahan otoriter. Lahirnya gerakan 30 September PKI pun mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno.

*Ke tiga*, Demokrasi Pancasila 1965-1998<sup>19</sup>. Periode ini dimulai setelah gagalnya G30SPKI. Motivasi dan intensi utama masa ini ialah niat baik untuk mengembalikan dan memurnikan Kembali pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS pun menjadi landasan

---

<sup>18</sup> Wawan Tunggal Alam, *Demi Bangsaaku Pertentangan Bung Karno Vs Bung Hatta* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 276.

<sup>19</sup> Evi Purnamawati, *op.cit*, hlm. 256.

formil yang solid. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga dinamakan demokrasi Pancasila. Namun, demokrasi Pancasila sebatas dijadikan lambang dan retorika belaka, tanpa adanya implementasi yang seimbang.

*Ke empat*, Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang). Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Pada masa ini, ruang untuk berdemokrasi semakin lebar dan luas, seperti: kebebasan pers dalam ruang publik yang semakin terbuka, keterlibatan masyarakat dalam politik, pemberlakuan sistem multipartai, kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul sesuai aspirasi politiknya, rekrutmen jabatan politik yang transparan dan sebagainya<sup>20</sup>. Periode reformasi memperlihatkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, perjalanan demokrasi kurang-lebih 25 tahun terakhir sejak masa reformasi, terus mengalami pasang-surut atau fluktuasi, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Demokrasi Indonesia masih tergolong dalam demokrasi cacat atau *flawed democracy*. Kecacatan ini berdampak pada ranking bangsa Indonesia dalam dunia internasional yang kini menurun dari 52 menjadi 54. Bahkan di Kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia kalah dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina<sup>21</sup>. Artinya bahwa bangsa Indonesia sedang berada dalam fase kemunduran demokrasi yang signifikan. Pemilu yang sebenarnya mampu memperkuat demokrasi, malah menjadi arena permainan yang menggerus cita-cita demokrasi bangsa. Dan hal ini terjadi di pemilu 2024. Apabila gagal dalam membendung episode autokratisasi, Bangsa Indonesia akan tergelincir dalam kategori yang lebih buruk, yakni *electoral autocracy*, yang kemudian perlu selangkah lagi untuk menjadi negara *closed autocracy*<sup>22</sup>. Dengan demikian, perkembangan demokrasi Indonesia perlu dievaluasi terus-menerus dan dilakukan gerakan resistansi dan resiliensi untuk mengembalikan demokrasi yang autentik.

---

<sup>20</sup> L. Ida, "Election and Political Evil Ambition in The Indonesia's Reformasi Era", *Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea*, 59:4 (2014), <https://www.proquest.com/scholarly-journals/election-political-evil-ambition-indonesias/docview/1645742776/se-2>, hlm. 179.

<sup>21</sup> Faisal Javier, "Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan" dalam *tempo.co* 20 Februari 2023, <https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>, diakses pada 20 Maret 2024.

<sup>22</sup> Risky Alif Alvian, *loc.cit.*

## Back to nature: Konstruksi Koalisi Pro-Demokrasi

Pemikiran Rousseau didasarkan pada perspektifnya tentang kondisi awal manusia, yang disebutnya sebagai manusia alami<sup>23</sup>. Manusia alami hidup sesuai dengan kodrat alamiahnya, dengan kebebasan mutlak dan identitas yang asli. Dalam kondisi alamiah ini, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Namun, di sisi lain, kondisi alamiah juga dapat terganggu. Gangguan ini timbul dari pengaruh lingkungan dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Kodrat manusia yang baik pada awalnya dapat rusak oleh kejahatan yang muncul dalam perkembangan peradaban. Produk dari modernitas dan budaya sering kali hanya membawa keburukan. Bagi Rousseau, "Back to Nature" menjadi solusi terbaik untuk melindungi manusia dari berbagai kejahatan semacam itu. Namun, hal ini tidak berarti manusia harus kembali ke keadaan primitif yang sangat sederhana dan tertinggal<sup>24</sup>. Melainkan bagaimana manusia dapat mengembalikan sifat-sifat alamiahnya dengan penyesuaian yang tepat. Seperti yang tercermin dalam konsep kontrak sosialnya, di mana kebebasan alami berubah menjadi kebebasan sipil dalam konteks perjanjian sosial (negara) dan kebebasan alami menjadi kebebasan sipil yang dibatasi oleh kepentingan umum. Kebebasan inilah yang membuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan negara demokratis (sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi), tetapi juga dapat mengarah pada sistem yang otoriter.

Di tengah autokratisasi atau kemunduran demokrasi, bangsa Indonesia memerlukan sebuah resistansi dan resiliensi untuk mengembalikan demokrasi pada keautentikannya atau keasliannya. Bangsa Indonesia perlu mencegah kemunduran demokrasi lebih lanjut. Ada dua alasan urgen, mengapa resistansi harus segera dilakukan, yakni: *pertama*, momen autokratisasi terjadi dalam bentuk pergeseran electoral democracy menuju electoral autocracy. Kondisi semacam ini memberikan kesempatan emas bagi elite autokratik untuk mengeksploitasi institusi demokrasi dari dalam. *Kedua*, kekuatan elite autokratik yang semakin kuat akan mempersempit ruang resistansi negara. Jika kemelut semacam ini dibiarkan begitu saja, maka demokrasi Indonesia akan menjadi lebih buruk. "Back to nature" menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mengatasi kemunduran demokrasi. Dalam hal ini, gagasan "Back to Nature" hendak membawa kembali marwah

---

<sup>23</sup> Rahmad dan Rusma Yulidawati, *op.cit.* hlm. 25.

<sup>24</sup> Frederick Copleston, *Filsafat Rousseau* (Yogyakarta: Basabasi, Januari 2023), hlm. 179.

demokrasi yang sesungguhnya atau yang sesuai dengan prinsip asalnya. Apalagi Rousseau sangat menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan mendukung demokrasi dalam kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan rakyat adalah mutlak<sup>25</sup>. Untuk kembali pada demokrasi yang sesungguhnya serta membatasi kerusakan demokrasi selanjutnya, maka pembentuk koalisi pro-demokrasi menjadi alternatif terbaik yang mesti dilakukan.

Setidak-tidaknya ada tiga aktor penting yang mesti membentuk koalisi pro-demokrasi dan membatasi autokratisasi, yakni: aktor politik (partai politik), aktor institusional (aparatur negara), dan aktor sosial<sup>26</sup>. *Pertama*, aktor-aktor institusional adalah individu yang menempati posisi di berbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang bertanggung jawab untuk menjaga prinsip akuntabilitas di antara cabang kekuasaan eksekutif. Mereka memiliki wewenang dan kemampuan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga menolak segala upaya untuk konsolidasi kekuasaan secara otokratis. Contoh dari aktor-aktor ini termasuk Hakim Konstitusi atau Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Undang-Undang atau Keputusan Pemerintah yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi, anggota badan independen seperti otoritas antikorupsi yang memiliki wewenang untuk menentang keputusan eksekutif yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, serta anggota otoritas pemilihan umum independen yang bertugas mengawasi proses pemilihan umum untuk memastikan transparansi dan keadilan, serta menolak tekanan dari eksekutif untuk melakukan manipulasi pemilihan.

*Kedua*, Para pelaku politik, termasuk pemimpin dan partai politik, memiliki kemampuan untuk menentang proses otokratisasi dalam konteks demokrasi, baik di dalam maupun di luar struktur lembaga negara. Biasanya, peran ini dilakukan oleh partai oposisi, baik melalui konteks kompetisi pemilihan umum maupun dalam perannya sebagai koordinator dan representasi dari berbagai kelompok dan kepentingan sosial. Representasi oposisi diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus control

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 175.

<sup>26</sup> Lukas Tomini, Suzan Gibril, dan Venelin Bochev, "Standing Up Against Autocratization Across Political Regimes: A Comparative Analysis of Resistance Actors and Strategies", dalam *Taylor and Francis Online*, 30:1, 2023, hlm. 124.

terhadap penyelenggaraan pemerintahan<sup>27</sup>. Namun, akhir-akhir ini, kemampuan para aktor ini untuk merespons otokratisasi dengan efektif cenderung menurun seiring dengan meningkatnya otoritarianisme. Selain itu, bentuk perlawanan politik yang tidak terkait dengan partai oposisi juga bisa muncul dari dalam partai yang berkuasa atau koalisi yang mendukungnya, dalam bentuk perpecahan internal antara faksi-faksi yang keras dan moderat, atau bahkan melalui pembelotan dari pihak sekutu partai. Jenis perlawanan "dari dalam" ini juga dipengaruhi oleh jenis rezim yang ada, karena dampak dari perbedaan pendapat menjadi lebih signifikan seiring dengan meningkatnya otoritarianisme, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perpecahan internal di kalangan penguasa.

*Ketiga*, Kelompok penentang sosial, yang sering disebut sebagai *social resisters*, adalah aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir perlawanan terhadap proses otokratisasi pada tingkat grassroot. Kelompok ini meliputi organisasi masyarakat sipil, gerakan sosial, lembaga keagamaan, gerakan mahasiswa, serikat buruh, serta individu dan kelompok dari berbagai bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Mobilisasi *social resisters* untuk demokrasi sangat penting untuk demokratisasi. Artinya bahwa mobilisasi masa dapat memainkan peran penting dalam menghentikan autokratisasi yang terjadi. Dalam hal ini, tekanan politik dari bawah dapat menciptakan peluang bagi oposisi demokratis untuk memenangkan pemilu dan untuk mencegah partai yang berkuasa melaksanakan reformasi lebih lanjut<sup>28</sup>. Kemampuan mereka untuk melawan dipengaruhi oleh karakteristik dari rezim politik. Ketika kebebasan untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat dihargai, serta hak-hak sipil dijaga, dan masyarakat sipil tidak tergantung pada pemerintah, ruang gerak bagi para aktor ini menjadi lebih luas. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam perlawanan terhadap otokratisasi dalam konteks seperti ini. Namun, sebaliknya, ketika rezim semakin otoriter, ruang gerak mereka akan semakin terbatas, dan kemampuan mereka untuk melakukan perlawanan menjadi terbatas.

---

<sup>27</sup>Yohan Wahyu, "Parpol Mana Berani jadi Oposisi?" dalam Kompas.id 21 february 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/21/parpol-mana-berani-jadi-oposisi>, diakses pada 21 Maret 2024.

<sup>28</sup>Felix Wiebrecht, dkk, "State of The World 2022: Defiance in The Face of Autocratization" dalam *Taylor and Francis Online*, 30:5, 2023, <https://www.tandonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2023.2199452>, diakses pada 22 Maret 2024.

Gerakan dari ketiga aktor ini sangat dipengaruhi oleh rezim yang ada. Sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, aktor institusional, politik, dan sosial bertanggung jawab untuk memberikan tekanan kepada elit otoriter agar agenda mereka tidak tercapai. Namun, tantangannya adalah ketika rezim otoriter berhasil memanipulasi ranah institusional, politik, dan sosial, melalui berbagai manuver politik. Ketika rezim otoriter berhasil memengaruhi ketiga aktor ini, maka kekuasaannya akan semakin kuat dan demokrasi akan semakin terkikis. Namun, jika rezim tidak berhasil mengendalikan para aktor tersebut, maka mereka tidak akan dapat mengkonsolidasikan kekuasaannya<sup>29</sup>. Selain manuver politik rezim, masalah kepercayaan di antara para aktor juga menjadi hambatan utama. Kurangnya kepercayaan di antara para aktor membuat mereka rentan terhadap pengaruh rezim dan kemungkinan untuk mengkhianati.

Dengan demikian, untuk menangani kekacauan dalam demokrasi Indonesia, perlu adanya upaya "Back to Nature". Penyimpangan menuju autokratisasi atau kemunduran dalam demokrasi telah menghambat kebebasan masyarakat dan kedaulatan yang dijunjung tinggi. "Back to Nature" dalam konteks pembentukan koalisi atau aliansi pro-demokrasi menjadi opsi yang harus diperhitungkan oleh bangsa Indonesia. Tentu saja, perlawanan terhadap otoritarianisme membutuhkan kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak yang terlibat. Namun demikian, membangun jalinan kerja sama di antara para aktor bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, jika setiap aktor bertindak secara terpisah tanpa berupaya untuk bekerja sama, maka demokrasi di Indonesia akan terus mengalami kemunduran. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rousseau:

Dengan kata lain, keadaan alami itu cenderung merosot juga. Oleh karena itu, manusia harus membentuk persekutuan untuk melestarikan keadaan itu. Di dalam persekutuan itu para individu diharapkan dapat mempertahankan keadaan asalnya, yaitu: hanya patuh kepada dirinya sendiri atau merdeka. Persekutuan ini menciptakan sebuah Lembaga moral kolektif yang disebut 'negara' bila dianggap pasif atau 'kedaulatan' bila dianggap aktif. Secara kolektif para anggotanya disebut 'rakyat' dan secara individual disebut 'warga negara'. Dalam Lembaga ini, kehendak individu tunduk pada 'kehendak

---

<sup>29</sup> Rochana Bajpai dan Yasser Kureshi, "Mechanisms of Democratic Authoritarianism: De-Centring the Executive in South Asia and Beyond" dalam *Taylor and Francis Online*, *Democratization* 29:8, hlm. 1382.

umum' (volonte generale) yang dianggap lebih mencerminkan kepentingan real daripada kehendak individu<sup>30</sup>.

Dengan demikian untuk mengembalikan marwah demokrasi yang autentik, bangsa Indonesia perlu *Back to Nature*. Bangsa Indonesia perlu membentuk sebuah persekutuan untuk melestarikan keadaan demokrasi yang sesungguhnya, dengan membentuk koalisi pro-demokrasi yang solid. Dan gerakan resistansi dan resiliensi perlu dilakukan dalam arena politik, intitusi dan sosial sekaligus, sehingga ke tiga aktor mesti membangun sebuah jalinan kerjasama yang baik untuk merepresi otoritarianisme dalam tubuh demokrasi Bangsa Indonesia. Ketika para aktor mampu membangun kerja sama yang baik dalam aliansi atau koalisi pro-demokrasi, maka rezim autokratik tidak akan bisa memperluas ranah kekuasaannya<sup>31</sup>. Dengan begitu, demokrasi Indonesia akan Kembali keadaan asalnya dan kedaulatan rakyat dapat ditegakan kembali.

## D. KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami naik-turun atau fluktuasi. Perjalanan demokrasi bangsa Indonesia dari era parlementer hingga reformasi belum menunjukkan perkembangan berdemokrasi yang optimal dan sesuai harapan. Bahkan periode reformasi yang diharapkan membawa demokrasi yang otentik, justru menjadi tempat subur bagi kemunduran demokrasi bangsa, di mana kekuasaan otoriter mendominasi dalam semua aspek. Pemilu yang dianggap dapat memperkuat demokrasi, justru menjadi arena bagi rezim untuk melemahkan demokrasi. Beberapa indeks demokrasi juga menunjukkan kondisi demokrasi yang stagnan dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kondisi kritis semacam ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed demokrasi, serta menurunkan peringkatnya dalam tatanan global.

Oleh karena itu, gagasan back to nature dari J.J. Rousseau menjadi alternatif terbaik untuk meminimalisir kemunduran demokrasi yang terjadi. Di tengah kekacauan dan kemunduran demokrasi yang signifikan, bangsa Indonesia perlu *Back to Nature*. Konsep ini sebagai bentuk resistansi dan resiliensi untuk mengembalikan martabat demokrasi

---

<sup>30</sup> F. Budi Hardiman, *op.cit.* hlm. 116.

<sup>31</sup> Rochana Bajpai dan Yasser Kureshi, *loc.cit.*

yang otentik atau yang asli. Hal ini dilakukan dengan membangun kerjasama yang pro-demokrasi di antara ketiga aktor penting, yaitu: aktor politik, aktor institusional, dan aktor sosial. Ketika ketiga aktor ini dapat membentuk koalisi dan bekerja sama, maka mereka dapat menahan rezim otoriter, membatasi kekuasaannya, dan memperjuangkan kembali demokrasi yang otentik atau sejati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, Risky Alif. "Demokrasi yang Bertahan" dalam tempo.co 12 Februari 2024, <<https://koran.tempo.co/read/opini/487202/upaya-mencegah-kemunduran-demokrasi>>.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021" dalam THC INSIGHTS No.27/09 Juni 2021 [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id), <<https://scholar.google.com/sholar/fenomena-kemunduran-demokrasi-indonesia-2021>>.
- Wahyu, Yohan. "Pemilu 2024 dan Pertaruhan Demokrasi di Indonesia" dalam Kompas.id, 17 Januari 2024, <<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasi-indonesia?>>.
- Bertens, K. *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hardiman, F. Budi. *Pemikiran Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Ryansyah, Alvira Agatha Putri. "Demokrasi Kita Dalam Sudut Pandangan Rousseau", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, 2:2, Bandung, 2020.
- Syam, Firdaus. "Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke 3", 2007,05
- Rahmad dan Yulidawati, Rusma "Serpil Pemikiran Jean Jacques Rousseau Terhadap Pendidikan" dalam *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 2:2, Desember 2021.
- Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia" 18:2, Mei 2020.
- Puslit IAIN SYARIF Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Seri Tempo, *Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959*. Jakarta: Gramedia, 2019.

- Alam, Wawan Tunggal. *Demi Bangsaaku Pertentangan Bung Karno Vs Bung Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ida, L. "Election and Political Evil Ambition in The Indonesia's Reformasi Era", *Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea*, 59:4 (2014), <<https://www.proquest.com/scholarly-journals/election-political-evil-ambition-indonesias/docview/1645742776/se-2>>.
- Javier, Faisal. "Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan" dalam tempo.co 20 Februari 2023, <<https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>>.
- Copleston, Frederick. *Filsafat Rousseau*. Yogyakarta: Basabasi, Januari 2023.
- tomini, Lukas; Gibril, Suzan dan Bochev, Venelin. "*Standing Up Against Autocratization Across Political Regimes: A Comparative Analysis of Resistance Actors and Strategies*", dalam Taylor and Francis Online, 30:1, 2023.
- Wahyu, Yohan "Parpol Mana Berani Jadi Oposisi?" dalam Kompas.id 21 februari 2024, <<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/21/parpol-mana-berani-jadi-oposisi>>.
- Wiebrecht, Felix; dkk, "State of The World 2022: Defiance in the face of Autocratization" Taylor and Francis online, 30:5, 2023, <<https://www.tandonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2023.2199452>>.
- Bajpai, Rochana dan kureshi, Yasser. "Mechanisms of Democratic Authoritarianism: Decentring the Executive in South Asia and Beyond" dalam Taylor and Francis Online, Democratization 29:8.
- lit, Joep Van; dkk. "Countering Autocratization: A Roadmap for Democratic Defence", dalam Taylor and Francis Online, 2023, <<https://www.tandonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2023.2279677>>.